



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK,  
DJSN DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang : 2012-2013  
Masa Persidangan : IV  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dan RDP  
Dengan : 1. Menteri Kesehatan RI;  
2. Menteri Keuangan RI;  
3. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI;  
4. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Rabu, 10 Juli 2013  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Acara : Melanjutkan acara Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat hari Senin, tanggal 8 Juli 2013  
Ketua Rapat : Ir. Soepriyatno/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Hadir : a. orang dari 48 orang Anggota Komisi IX DPR RI  
b. Menteri Kesehatan RI beserta jajaran;  
c. Menteri Keuangan RI beserta jajaran;  
d. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI beserta jajaran;  
e. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, dibuka pukul 10.35 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014 secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat bersama dengan anggota Komisi IX DPR RI dan PT. Askes.
2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap bulan tentang perkembangan persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
4. Komisi IX DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait alokasi anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN dan 10% dari APBD di luar gaji
5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menyiapkan data mengenai:
  - a. Data 9 provinsi yang menyatakan siap menjalankan universal health coverage dengan sistem Jamkesda di wilayahnya.
  - b. Roadmap batas waktu penyelesaian seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.
  - c. Skema penguatan sistem rujukan, termasuk sosialisasi mengenai sistem rujukan kepada penyedia pelayanan kesehatan.
  - d. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat I.

**Rapat diakhiri pukul 15.05 WIB**

**KETUA RAPAT,**



**Ir. SOEPRİYATNO**